

ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN PERCERAIAN ASN DI KABUPATEN SUMEDANG

Dadang Priyatna*, Cecep Hasanudin, Meilani Maryam
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April
E-mail: dadang.priyatna@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out, obtain objective data and information regarding the Analysis of Management Information Systems in the Divorce Licensing Process State Civil Apparatus (ASN) In The Staffing And Human Resource Development Agencies Sumedang District. The existence of information in an institution, including government is very complex and has an important role. One unit produces information with each other, requires information, and exchanges information. The management information system contains a set of organizational procedures which when implemented will provide information for decision making and or for controlling the organization. The problems studied in this study are related to the management information system (SIM) and state administration Management Information System (SIM) are directed to support decision making, as well as planning and control. The position of the state administration with the Management Information System (SIM) is closely related especially in a work that support each other to achieve a goal. The method used in this research is qualitative research methods with data collection, observation steps, in-depth interviews and documentation. From this research, there are obstacles regarding the Management Information System in the Divorce Licensing Process State Civil Apparatus (ASN) At The Staffing And Human Resource Development Agencies Sumedang District, namely: human resources, supporting facilities, disciplinary application, and information technology. Efforts to overcome obstacles include increasing discipline, procurement and management of facilities and infrastructure, division of labor, and management of information and data in the Divorce Licensing Process State Civil Apparatus (ASN) At The Staffing And Human Resource Development Agencies Sumedang District.

Keywords: *Management Information System, Process Licensing, Divorce*

PENDAHULUAN

Sistem informasi manajemen dalam penyelenggaraan lembaga, menduduki peranan yang sangat penting. Sistem informasi manajemen berisikan sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambilan putusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem Informasi manajemen dapat diartikan sebagai sistem manusia/mesin yang terpadu (*Integrated*) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan putusan dalam sebuah organisasi. Tujuan Sistem Informasi Manajemen dapat membantu pimpinan dalam mengambil putusan yang tepat. Ketepatan pembuatan putusan ini didasarkan pada jenis asupan atau suplay informasi yang tepat pula. Setiap level, jenis atau bidang hierarki organisasi memiliki

informasi yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini, manajemen sistem informasi yang efektif yaitu manajemen informasi yang mampu memilih dalam memilah jenis-jenis informasi spesifik yang dibutuhkan para pimpinan dalam membuat keputusan.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai tiga bidang yaitu bidang pengadaan dan informasi, bidang kinerja dan penempatan dalam jabatan, dan bidang pengembangan kompetensi aparatur. Dari ketiga bidang tersebut terdapat sub-sub bidang yang memiliki uraian tugas masing-masing. Salah satunya dalam sub bidang disiplin dan penghargaan memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan proses

pemberian izin dan / atau rekomendasi perkawinan dan perceraian ASN dan PPPK.

Oleh sebab itu dalam rangka mendukung proses penerbitan perizinan surat izin perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memenuhi standar prosedur perizinan perceraian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan mendapat sanksi berat yaitu berupa penurunan pangkat bahkan bisa diberhentikan secara tidak hormat.

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan beberapa indikasi mengenai sistem informasi manajemen perizinan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang yang belum baik. Hal ini dapat dilihat dengan indikasi-indikasi masalah sebagai berikut:

1. Fasilitas pendukung yang kurang memadai pada Bidang Kinerja dan Penempatan Dalam Jabatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga kondisi

ruangan pada Bidang Kinerja dan Penempatan Dalam Jabatan kurang tertata dengan baik.

2. Sistem penyampaian informasi mengenai proses perizinan perceraian ASN masih kurang efektif, sehingga terdapat ASN yang mengajukan perceraian langsung ke pengadilan agama tanpa melalui proses di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Sistem informasi manajemen yang digunakan masih kurang efektif dalam pengambilan keputusan, dimana seharusnya proses perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui beberapa indikasi masalah dalam mengurangi pengangguran di kabupaten sumedang yaitu: 1) Bagaimana sistem informasi manajemen perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang?; 2) Apa saja faktor penghambat sistem informasi manajemen perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang?; 3) Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat sistem informasi manajemen perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang?.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Menurut O'Brien (dalam Rusdiana dan Irfan, 2014:94) sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang mendapatkan hasil keluaran (*output*) dengan menggunakan masukan (*input*) dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen (Wikipedia, 2010).

Menurut Kadir (dalam Rusdiana dan Irfan, 2014:94) mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung operasi,

manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Menurut Stoner (dalam Rusdiana dan Irfan, 2014:95) sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu pada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif dan pengendalian. Dari pengertian yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi.

Proses Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen

Menurut Hakim, dalam bukunya *prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi Manajemen* (2019:47) menguraikan proses sistem informasi manajemen secara sederhana, di antaranya sebagai berikut:

1. Ada data yang akan diolah
2. Ada instrument untuk mengolah data tersebut
3. Ada mekanisme dalam pengolahan data
4. Data yang telah diolah akan menjadi informasi
5. Informasi disajikan kepada pengguna
6. Pengguna informasi akan menggunakan sesuai tujuan.

Komponen Sistem Informasi Manajemen Secara Fungsional

Menurut Niken (dalam Rusdiana dan Irfan, 2014:100) mengatakan bahwa Komponen sistem informasi secara fungsional adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen, meliputi:

1. Sistem Administrasi dan Operasional. Sistem ini melaksanakan kegiatan rutin seperti bagian personalia, administrasi dan sebagainya yang telah ditentukan prosedurnya. Sistem ini harus diteliti terus menerus agar perubahan segera diketahui.
2. Sistem Pelaporan Manajemen Sistem. sistem ini berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan yang bersifat periodik kepada pengambil keputusan atau manajer.
3. Sistem *Database*. Sistem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi. *Database* mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi sehingga interaksi anatar unit akan bertambah besar dan menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah.

4. Sistem Pencarian. Sistem ini berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dan dalam bentuk yang tidak terstruktur.
5. Manajemen Data. Sistem ini berfungsi sebagai media penghubung antar komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara tiap-tiap komponen sistem informasi.

Dimensi Sistem Informasi Manajemen

Menurut Davis (dalam Rusdiana, Irfan, 2014:93) menawarkan konsensus bahwa terdapat lima aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang Sistem Informasi Manajemen, yang membagi kompetensi dalam dimensi indikator sebagai berikut:

1. Proses manajemen
 - a) Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi masa pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan. Menurut Anthony perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program selama beberapa tahun. Dapat disimpulkan bahwa rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entias. Sedangkan Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kesetiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses

- perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang.
- b) Pengelolaan fungsi sistem informasi. Pengelolaan fungsi sistem informasi adalah prosedur logis dan rasional untuk melakukan atau merencanakan suatu rangkaian komponen yang berhubungan satusama lain.
2. Proses pengembangan
 - a) Aktivitas. Didefinisikan sebagai usaha-usaha yang dikemukakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, ditempat mana pelaksanaan, kapan waktu dimulai dan berakhir, lebih lanjut aktivitas adalah sebuah kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi.
 - b) Metode. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hidayat "kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang berarti jalan atau cara. Jalan atau cara yang dimaksud disini adalah sebuah upaya atau usaha dalam meraih sesuatu yang diinginkan."
 3. Konsep pengembangan
 - a) Konsep kualitas. Konsep kualitas adalah keseluruhan karakteristik organisasi yang bertindak dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan. Menurut Juran Kualitas adalah kesesuaian antara tujuan dan manfaat.
 - b) Konsep sosio-teknikal. Konsep sosio-teknikal adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi ditempat kerja.

4. Representasi
 - a) Sistem basis data. Sistem basis data dapat diartikan suatu sistem yang didalamnya terdiri dari koleksi data atau dari suatu kumpulan data yang saling berhubungan dan memungkinkan berbagai program untuk mengakses dan memanipulasi data tersebut.
 - b) Pengkodean data. Pengkodean data. Dalam ilmu sosial, pengkodean merupakan suatu proses analitik data. Data yang telah dikategorikan kemudian dianalisis. Salah satu tujuan pengkodean data adalah mengubah data menjadi bentuk yang sesuai untuk dianalisis.
5. Sistem Aplikasi
 - a) *Knowledge management*. *Knowledge management* adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari dalam organisasi.
 - b) *Eksekutif system*. *Eksekutif system* adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari diluar yang relevan dengan tujuan organisasi. EIS membantu eksekutif menemukan data yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pengguna dan mempromosikan informasi berbasis wawasan dan pemahaman.

Faktor Penghambat Sistem Informasi Manajemen

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut Davis (2013), yang diataranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak

dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

- a) Disiplin yang dimiliki pegawai
 - b) Tanggung Jawab yang dimiliki pegawai
2. Fasilitas merujuk pada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
 - a) Sarana prasarana
 - b) Pengelolaan program
 3. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
 - a) Keterbatasannya waktu
 - b) Hasil yang dicapai
 4. Teknik Teknologi Informasi merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi.
 - a) Informasi
 - b) Kemampuan

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Informasi Manajemen

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan Sistem Informasi Manajemen

METODE

Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian metode Kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena dianggap lebih

(SIM) menurut Davis (2013), yang diataranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri.
 - a) Sumber hukum
 - b) Pengadaan
2. Fasilitas merujuk pada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari:
 - a) Pengelolaan
 - b) Rusak/*Error*
3. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
 - a) Manajemen waktu
 - b) Pembagian kerja
4. Teknik Teknologi Informasi merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi.
 - a) Pengumpulan data
 - b) Kemampuan

mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan yang dihadapi dilapangan.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari Analis Kepegawaian Muda pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Kinerja Dan

Penempatan Dalam Jabatan, Kepala Sub Bidang Displin dan Penghargaan, dan Staff Sub Bidang Displin dan Penghargaan.

Prosedur pengolahan data terdiri dari *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data*

Display (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing Verification* (Pemeriksaan Kesimpulan atau Verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Informasi Manajemen Perizinan Perceraian ASN di Kabupaten Sumedang

Perencanaan strategis untuk syarat bagi pemohon yang ingin mengajukan izin perceraian harus didasarkan kepada persyaratan yang telah ditentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yaitu diantaranya: 1) Permohonan izin cerai kepada pejabat yang bersangkutan, 2) Rokemendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan, 3) Berita acara dari SKPD yang bersangkutan, 4) Surat Keterangan dari BP4, 5) Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermaterai 6000 , 6) Foto Copy Surat Nikah, 7) Foto Copy SK Pangkat terakhir, 8) Foto Copy KTP suami istri.

Pengelolaan fungsi sistem informasi manajemen untuk teknik pemberian informasi mengenai tahapan proses perizinan perceraian dilakukan melalui pembinaan dan sosialisasi kepada setiap SKPD di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang. Akan tetapi kurangnya sistem penyampaian informasi sehingga masih banyaknya ASN yang mengajukan perceraian langsung ke pengadilan agama tanpa melalui proses di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Waktu yang dibutuhkan untuk aktivitas dalam proses pembuatan

perizinan perceraian ASN Kabupaten Sumedang memerlukan waktu selama tiga bulan dan hal tersebut telah tercantum dalam RENSTRA BKPSDM Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi masih terdapat proses pengelolaan izin perceraian yang melebihi waktu yang telah ditentukan.

Metode yang dilakukan pegawai dalam pelayanan proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang pegawai dalam melakukan pelayanan perizinan perceraian ASN dilakukan pegawai dengan cara manual dengan didukung oleh sarana dan prasarana. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya buku agenda untuk surat masuk dan surat keluar.

Konsep kualitas informasi dalam pelayanan proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang pada sistem penginformasian sudah relevan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal tersebut dilihat dari adanya data-data ASN yang hendak melakukan perceraian terlebih dahulu melakukan proses perizinan perceraian melalui BKPSDM Kabupaten Sumedang.

Konsep sosio-teknikal dalam mengaplikasian teknologi pendukung proses perizinan perceraian ASN dilakukan dengan cermat dan teliti oleh pegawai di BKPSDM Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fasilitas pendukung teknologi yang terdapat di Bidang Kinerja dan Penempatan Dalam Jabatan.

Teknologi pendukung untuk menunjang sistem basis data dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang menggunakan

sistem komputerisasi. Hal tersebut dilihat dari terdapatnya sarana dan prasarana pendukung berupa teknologi seperti komputer dan laptop untuk mengolah data.

Dalam pengkodean data untuk teknik pengarsipan dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang yaitu dengan dimasukan ke dalam file dan disimpan dalam komputer serta arsip disimpan dalam lemari arsip. Hal tersebut dilihat dari adanya fasilitas pendukung teknologi berupa komputer, laptop dan lemari arsip yang digunakan untuk penyimpanan data.

Knowledge Management untuk tahapan pengelolaan perizinan perceraian ASN yaitu adanya pengajuan dari SKPD lalu di proses di BKPSDM Kabupaten Sumedang, selanjutnya meminta pembinaan kepada BP 4, lalu dibuatkan surat izin perceraian yang disetujui oleh Bupati. Tahapan proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada SOP.

Manajemen sistem informasi (*eksekutif system*) yang menjadi pendukung penerbitan surat izin perceraian ASN di Kabupaten Sumedang menggunakan sistem informasi yaitu melalui surat dan telepon seluler. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fasilitas pendukung teknologi berupa komputer, printer dan telepon.

Faktor Penghambat Sistem Informasi Manajemen Perizinan Perceraian ASN di Kabupaten Sumedang

Disiplin yang dimiliki pegawai dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang hambatannya yaitu disiplin waktu yang dimiliki pegawai belum sesuai dengan SOP. Hal tersebut dilihat dari adanya proses pengelolaan izin perceraian ASN yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab yang dimiliki pegawai dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang hambatannya yaitu terdapat salah satu pegawai yang mengemban tanggung jawab dan pekerjaan jabatan lain yang kosong.

Sarana dan prasarana dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang hambatannya yaitu penataan ruangan pada bidang Kinerja dan Penempatan Dalam Jabatan kurang tertata dengan baik dan rapih.

Pengelolaan program dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang hambatannya yaitu kurang berkembangnya teknologi informasi pendukung untuk menunjang proses perizinan perceraian ASN.

Keterbatasan waktu dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang hambatannya yaitu kurangnya peningkatan disiplin waktu dalam sistem informasi manajemen untuk penyelesaian proses perizinan perceraian ASN.

Hasil yang dicapai dalam manajemen perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang hambatannya yaitu adanya tumpang tindih pekerjaan pada sub bidang disiplin dan penghargaan. Dimana seharusnya setiap pegawai melaksanakan tugasnya masing masing namun dalam hal ini ada salah satu pegawai yang mengemban dua tanggung jawab sekaligus.

Pengelolaan informasi dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang hambatannya yaitu untuk penataan berkas-berkas pada tempat penyimpanan di ruangan Bidang kinerja dan Penempatan Dalam Jabatan kurang tertata dengan baik dan rapih.

Kemampuan dalam proses perizinan perceraian ASN Kabupaten Sumedang hambatannya yaitu kurangnya konsentrasi pegawai dalam melakukan

pekerjaan yang disebabkan oleh pegawai tersebut sedang mempunyai masalah pribadi.

Upaya Mengatasi Hambatan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Perceraian ASN di Kabupaten Sumedang

Upaya untuk menerapkan kedisiplinan pegawai dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang yaitu adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 yang menjadi sumber hukum tentang disiplin ASN dengan penerapan sanksi apabila terdapat pelanggaran.

Upaya untuk meningkatkan tanggungjawab pegawai terhadap pekerjaannya dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang yaitu dengan mengajukan pengadaan staff baru untuk mengisi jabatan yang kosong kepada Kepala Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian dengan mengikuti prosedur dalam RENJA Tahun 2020 BKPSDM Kabupaten Sumedang.

Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara pengajuan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kepada Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan pada RENJA Tahun 2020 BKPSDM Kabupaten Sumedang.

Upaya untuk mengatasi hambatan ketika terjadi kesalahan pemberian informasi dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik, yaitu dengan cara melakukan perbaikan secepatnya sesuai dengan SOP agar pemberian informasi berjalan dengan efektif dan efisien.

Manajemen waktu untuk upaya mengatasi permasalahan dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait selain BKPSDM agar proses penerbitan izin perceraian berjalan dengan baik tanpa hambatan serta dapat selesai dengan tepat pada waktu yang telah diberlakukan.

Pembagian kerja untuk upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang yaitu membagi pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan SOP agar tidak terjadi kesalahan.

Pengumpulan data untuk upaya mengatasi hambatan dalam sistem penyimpanan data-data dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip-arsip atau data seperti buku agenda untuk surat masuk dan surat keluar serta lemari untuk penyimpanan arsip. Hal tersebut dilakukan agar arsip-arsip tersimpan dengan baik dan aman.

Kemampuan sebagai upaya mengatasi hambatan jika terjadi kesalahan ketika pegawai tidak fokus dalam melaksanakan pekerjaan dalam proses perizinan perceraian ASN pada Bidang Kinerja dan Penempatan Dalam Jabatan di BKPSDM Kabupaten Sumedang adalah dengan sering diberikannya motivasi oleh pemimpin. Hal tersebut dilakukan agar menghindari terjadinya kesalahan pegawai ketika bekerja sehari-harinya

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem informasi manajemen perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan sesuai dengan RENJA BKPSDM Kabupaten Sumedang Tahun 2020. Namun dalam pelaksanaan RENJA terkait perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang dihadapkan dengan berbagai hambatan

Saran

1. Diperlukan adanya pengadaan pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong di Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan.
2. Diperlukan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan pekerjaan pegawai di BKPSDM Kabupaten Sumedang.
3. Pegawai BKPSDM Kabupaten Sumedang diharapkan mampu melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam proses pengelolaan

seperti disiplin dan tanggung jawab dari pegawai BKPSDM Kabupaten Sumedang yang bekerja mengurus perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang, sarana dan prasana, pengelolaan program, dan pengelolaan informasi dalam perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang.

perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang.

4. Diperlukan adanya pembagian kerja yang jelas dalam proses pengelolaan perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang.
5. Diperlukan adanya perbaikan dalam proses penyimpanan arsip agar data-data mengenai perizinan perceraian ASN mudah ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2019. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori dan Fakta Upaya Menciptakan Good Governance: Cetakan III*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2018. *Ekologi Administrasi, Holistik, Kontemporer, dan Konstektual: Cetakan I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muhammad, Arni. 2017. *Komunikasi Organisasi: Cetakan XV*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik: Cetakan IX*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susanto, Azhar. 2016. *Sistem Informasi Manajemen, Konsep dan Pengembangan Secara Terpadu: Cetakan I*. Bandung: Lingga Jaya.
- Indrayani, Etin, & Gatningsih. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, Konsep dan Aplikasinya Pada Organisasi Pemerintahan / Pemda: Cetakan I*. Sumedang: Institusi Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press.
- Hakim, Lukman. 2019. *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Informasi Manajemen, Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen Pendidikan: Jambi: CV. Timur Laut Aksara*.
- Rusdiana, & Irfan, Moch. 2014. *Sistem Informasi Manajemen: Cetakan I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusdiana, & Ghazin, Ahmad. 2014. *Asas-Asas Manajemen Berwawasan Global: Cetakan I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rifa'i, Muhammad, & Fadli, Muhammad. 2013. *Manajemen Organisasi: Cetakan I*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D: Cetakan 24*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Siyoto, Sandu, & Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian: Cetakan I*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Hasibuan, Malayu S.P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi: Cetakan XVI*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi: Cetakan I*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian: Cetakan I*. Yogyakarta: Literasi Media Publising.